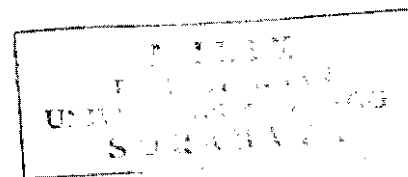


SKRIPSI

*NUGROHO TRICAHYONO*



**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA  
BERKAITAN DENGAN LIKUIDASI BANK**



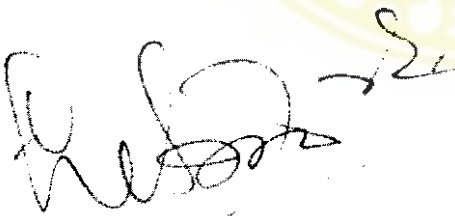
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA  
BERKAITAN DENGAN LIKUIDASI BANK**

**S K R I P S I**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

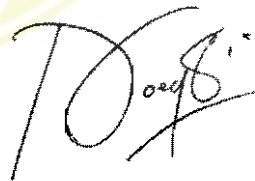
**Pembimbing,**



**LISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.**

**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**



**NUGROHO TRICAHYONO**

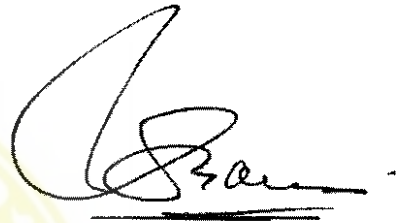
**NIM. 039413937**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1999**

TELAH DIUJI DIHADAPAN PANITIA PENGUJI  
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 1999

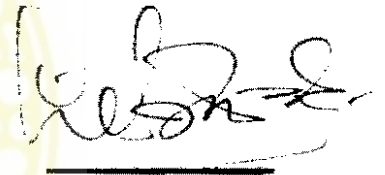
TIM PENGUJI SKRIPSI :

1. KETUA : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



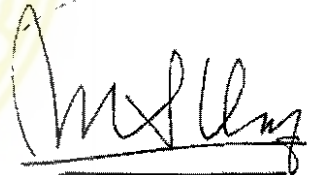
---

2. ANGGOTA : - Usman Iskandar, S.H., M.S.



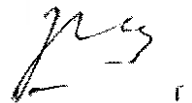
---

- Hj. Moerdlati, S.H., M.S.



---

- Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



---

- Sri Handayani, S.H., M.Hum.

---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia ada dua macam, yaitu perlindungan yang bersifat preventif yang berupa keharusan bagi pengurus bank untuk menjaga kesehatan bank dan perlindungan yang bersifat represif yang berupa kedudukan nasabah penyimpan dana diatas kreditur lain dalam urutan pembayaran kewajiban bank yang terdapat dalam PP No 68/1996. Kesehatan bank menjadi aspek yang penting bagi bank karena keberadaanya berkaitan dengan kelangsungan hidup dari usaha perbankan itu sendiri. Walau PP No 68/1996 menempatkan kedudukan nasabah penyimpan dana diatas kreditur lain dalam tingkat prioritas pembayaran bagi bank yang dilikuidasi, tapi dalam prakteknya kedudukan nasabah penyimpan dana tetap dibawah kreditur preferen yang mendapat prioritas berdasar BW dan UU No 4/1996, karena kedudukan PP No 68/1996 dalam hirarki lebih rendah kedudukannya dari undang-undang. Dalam hal ini berlaku asas *lex superiorem derogat legi inferiori*.
- b. Ada upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana untuk memungkinkan kembalinya semua dana simpanan dalam peristiwa likuidasi bank, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang ditujukan kepada bank, dimana pelaksana putusan pengadilan tersebut

nantinya adalah tim likuidasi sebagai wakil bank terlikuidasi. Adapun dasar gugatan ada dua, yaitu karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh bank dan adanya perbuatan melanggar hukum yang juga dilakukan oleh bank sebagai badan hukum (subyek hukum), dan atau oleh pengurus bank dan atau pemilik bank. Memang sita jaminan aset bank tidak mungkin bisa dilakukan karena terbentur peraturan likuidasi, tapi jika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus terbukti (sehingga menyebabkan bank ambruk dan dilikuidasi), harta pribadi mereka bisa dijadikan sita jaminan sehingga bisa menambah harta yang akan dibagikan kepada para kreditur (nasabah penyimpan dana) sebagai pelunasan kewajibannya.

## 1. Saran

- a. Untuk lebih dapat memberikan kepastian bagi perlindungan kepada nasabah penyimpan dana, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan harus lebih tegas dalam memberi sanksi kepada bank yang melanggar prinsip kehati-hatian sehingga kesehatan bank lebih dapat terjamin. Selain itu, agar kedudukan nasabah mendapat tempat yang lebih diutamakan dalam prioritas penetapan kewajiban bank, termasuk berkedudukan diatas pihak-pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti gaji pegawai yang terutang, biaya kantor yang terutang, dan lain-lain, maka perlu segera dibuat undang-undang yang mengatur mengenai diutamakannya kedudukan nasabah penyimpan dana jika bank tempat menyimpan dana tersebut dilikuidasi, seperti halnya UU No 2/1992 yang menempatkan kedudukan pemegang polis pada urutan yang

diutamakan, kecuali pembayaran atas hak negara. Atau untuk lebih mudahnya, perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagai pelaksanaan pasal 37 B UU No 10/1998 sehingga pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan terutama dalam skim asuransi dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Seiring dengan makin maraknya permasalahan keselamatan dana nasabah dalam peristiwa likuidasi bank, prlu kiranya segera dibuat peraturan yang tegas yang memungkinkan adanya perlawanan nasabah penyimpan dana terhadap tindakan tim likuidasi dalam pembagian harta likuidasi, sehingga nasabah bisa memperoleh kembali dananya seperti sebagaimana mestinya.

